

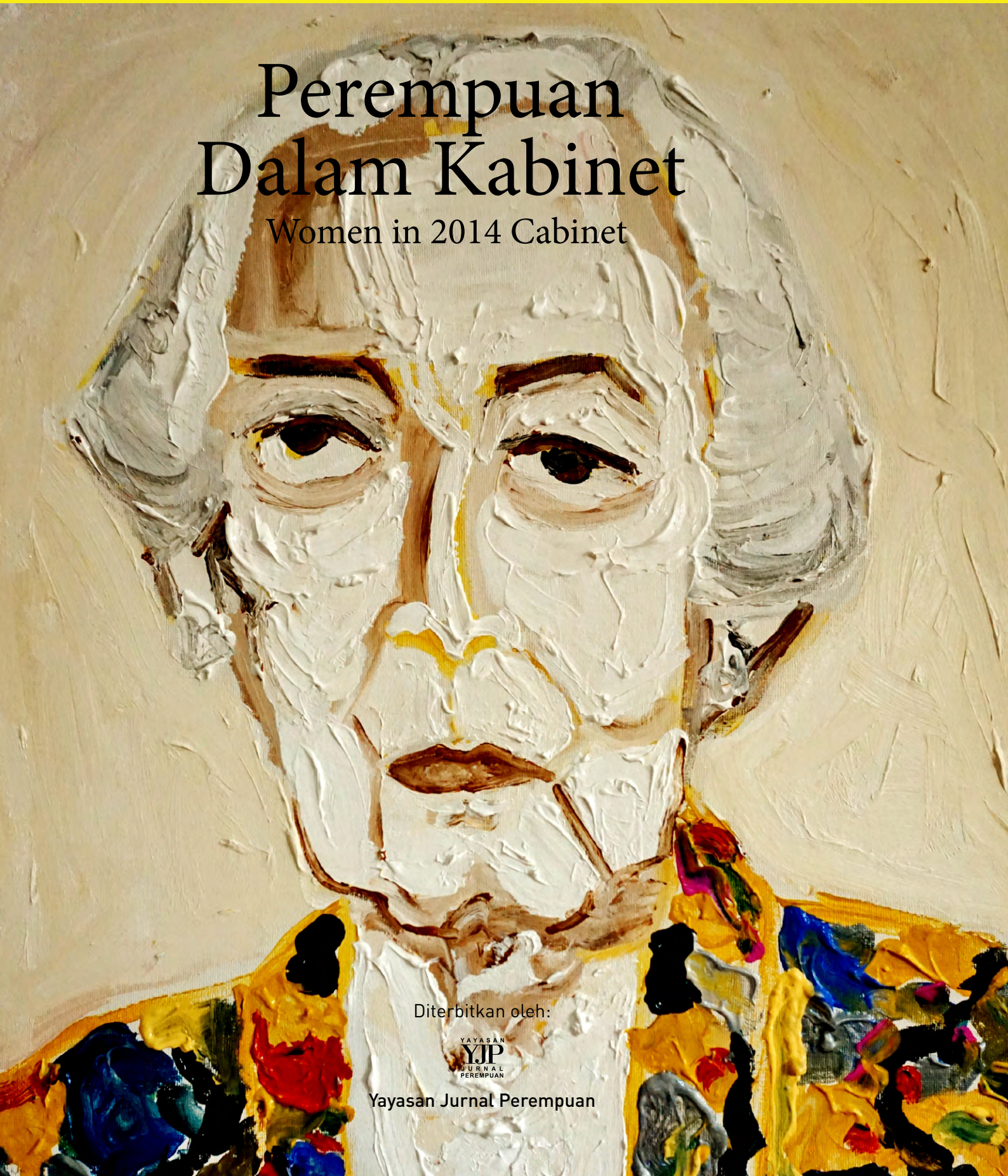
Perempuan Dalam Kabinet

Women in 2014 Cabinet

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

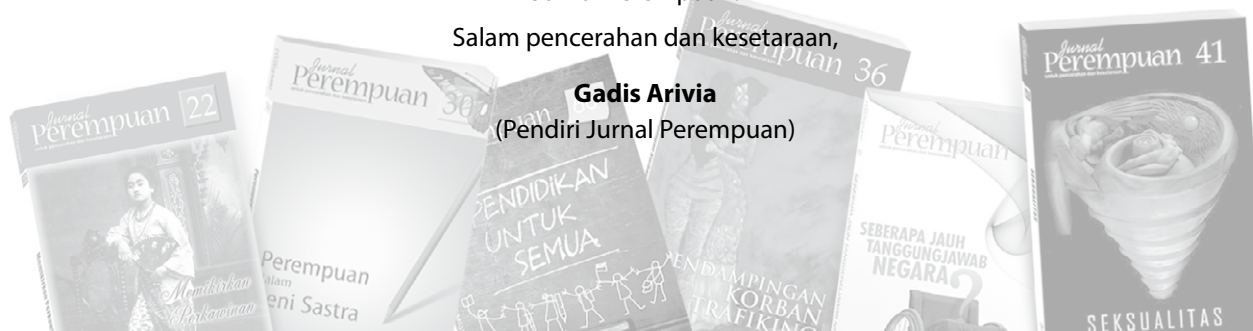
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics* 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics* 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'etre of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance* 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings 333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

“Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan”

Sirimavo Bandaranaike terpilih menjadi perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri di Sri Lanka di tahun 1960. Sejak saat itu kurang dari 80 perempuan dari belahan dunia lain mencapai posisi eksekutif baik sebagai menteri, perdana menteri atau presiden. Di tahun 1990 setidaknya ada 26 perempuan yang menduduki posisi eksekutif dalam kabinet-kabinet negara-negara di dunia, yang kemudian angkanya naik menjadi 37 perempuan di tahun 2000—yaitu mengalami kenaikan tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 60-an, 70-an, dan 80-an (UNDP, *Gender Leadership in Executive Report*, 2013). Meskipun demikian masih banyak negara yang harus bekerja keras untuk meruntuhkan “atap kaca” (kerap disebut sebagai *glass ceiling*). Atap kaca benar-benar pecah di Finlandia dimana tiga perempuan berada dalam pucuk pemimpin eksekutif. Jumlah perempuan dalam parlemen Denmark adalah 49 persen tercatat di akhir tahun 2013, demikian juga Swedia sejumlah 42 persen, angka yang sangat tinggi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sedikit retak di Inggris, dengan Margaret Thatcher menjadi contoh perdana menteri perempuan terkuat di jamannya. Dan atap kaca masih benar-benar utuh, dan tak pecah, karena Hillary Clinton gagal menjadi Presiden di Amerika. Kajian *Jurnal Perempuan* 83 kali ini akan mengevaluasi kembali sistem politik, sistem pemerintahan, stereotip perempuan pemimpin, dan pemahaman atas karakteristik dan kepribadian pemimpin dari kaca mata ilmuwan politik, pemerintahan dan sosiolog dalam sumur paradigma filsafat feminisme.

Representasi perempuan dalam politik sesungguhnya tidak boleh hanya melulu pada persoalan gender (secara esensialis menyangkut “kuota perempuan”), tetapi harus juga merangsek dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, dalam

konteks internasional dan nasional atas posisi profesional politisi perempuan. Ini memiliki makna lebih luas lagi, yaitu **pengarusutamaan gender dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan**. Kajian ini menyadari bahwa sistem pandangan dunia politik kenegaraan, eksekutif dan birokrasi masih menampilkan wajah lama yang melanggengkan ketidakadilan gender. Wajah kabinet baru Indonesia tahun 2014-2019 akan dikaji secara lebih spesifik dari perspektif individual dengan memperhatikan konteks profesi, struktur kekuasaan, dan karakteristik profesi perempuan yang sesungguhnya “berbeda” dari laki-laki, dan pada skala tertentu, atau lebih sering, perempuan dipaksa menjadi “laki-laki” dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Tata kelola pemerintahan yang mempromosikan kesetaraan gender menyadari perbedaan karakteristik ini dan tidak memaksakan generalisasi dalam pandangan filosofisnya. Dunia mencatat bahwa perempuan dapat lebih mudah menguasai level parlemen daripada level eksekutif. Padahal level kepresidenan memiliki otoritas lebih tinggi dan lebih independen dalam sistem kekuasaan daripada sistem parlementer. Dalam buku terbaru karya Farida Jalalzai berjudul *Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide* (Oxford University Press, 2013), dia menemukan lebih dari 300 perempuan dunia telah menjalankan tugas-tugas eksekutif dan hanya 21 perempuan yang mampu menduduki posisi tertinggi. Kajian ini juga mengungkap hanya 16 perempuan yang bisa mencapai posisi kepresidenan. Dari angka ini masih banyak perempuan yang hanya menjadi bayang-bayang dari pemimpin laki-laki di sampingnya, atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau klan keluarganya. Meskipun banyak tantangan yang melawan perempuan naik dalam posisi

kekuasaan kenegaraan, tetapi perempuan dapat menghadapi kesulitan ini, terutama dalam konteks politik yang tidak stabil dimana perempuan memiliki hubungan darah dengan oligarki kekuasaan rezim tertentu. Meskipun ini merugikan perempuan, tetapi paling tidak perempuan mendapatkan pengalaman-pengalamannya yang berbeda dari sebelumnya dimana perempuan merupakan lawan-inferior yang tidak berpengalaman sama sekali dalam hal politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Dalam bukunya Jalalzai menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan lebih bersifat konsensual daripada laki-laki, dimana laki-laki mempertahankan kontrol dan kekuasaan (2013: 43). Hal ini juga menjelaskan bagaimana kemudian kepemimpinan perempuan dalam eksekutif lebih bersifat lunak dan kolaboratif. Temuan Jalalzai ini kemudian mengkonfirmasi bagaimana kepemimpinan juga tak lepas dari karakter gender masing-masing individu, sebagai sebuah temuan yang umum, meskipun tidak bisa dipaksakan menjadi untuk "siapa saja" karena sifatnya yang kontekstual.

Beberapa kajian sebelumnya mewartakan bahwa banyak kepemimpinan perempuan dalam posisi eksekutif baik level nasional, provinsi dan kabupaten merupakan kabar gembira, karena menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang diraih perempuan pemimpin. Indonesia mencatat Walikota Surabaya Risma, Bupati Kebumen Rustri, meskipun juga mencatat kegagalan terbesar Gubernur Banten Ratu Atut yang terjerat kasus mega korupsi demikian juga Bupati Karanganyar Rina Iriani. Partisipasi politik dan kenegaraan perempuan sebagaimana laki-laki juga mengalami naik-turunnya. Catatan-catatan korupsi juga menjadi pekerjaan tersendiri dalam diskursus kepemimpinan perempuan dalam lingkup eksekutif. Kajian menunjukkan bahwa perempuan

harus berjuang lebih keras dari laki-laki dalam meraih posisi eksekutif, tidak hanya latar belakang pendidikan, lingkaran keluarga, pengaruh keluarga, dan lain-lain, tetapi juga harus berjuang melawan segala "prasangka" bahwa perempuan tidak memiliki "kemampuan asal" (kerap disebut takdir) dalam memimpin. Asia dan Amerika Latin adalah rumah dimana tradisi atas perempuan yang tidak memimpin ini dipelihara. Hubungan darah, situasi tidak stabil, dan transisi demokrasi dalam banyak kasus telah menolong perempuan memasuki tangga paling puncak kekuasaan eksekutif—sebagai janda perdana menteri atau sebagai anak perempuan seorang presiden yang terbunuh, misalnya, kemudian perempuan duduk dalam kursi kekuasaan, kemudian mengenal secara tak sengaja tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan betapa lemahnya perempuan yang menjadi pemimpin berasal dari akar organik, karena dia memang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas menjadi pemimpin. Bahkan juga dipercayai, bahwa meskipun perempuan memimpin, dia selalu tak dipercaya akan berhasil memimpin. *Jurnal Perempuan* 83 edisi *Status Perempuan dalam Kabinet* ini akan meneliti dan mengulas bagaimana menjelaskan mekanisme politik bagi perempuan untuk dapat mencapai jaring dalam habitus tata kelola pemerintahan, baik secara filosofis, kesejarahan, paradigmatik dan praktis, terutama bagi politisi perempuan rentan yang berasal dari keluarga tidak stabil secara ekonomi-politik dan tidak masuk dalam lingkaran oligarki politik tertentu atau dapat kita sebut sebagai "politisi perempuan organik". Negara dan partai politik bertanggung-jawab atas para perempuan aktivis politik brilian tersebut dengan kehendak-kehendak politiknya, baik formal via kebijakan dan informal via praktik budaya politik. (Dewi Candraningrum, *Pemimpin Redaksi*).

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Philips J. Vermonte. Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS. Jl. Tanah Abang III No. 23-27

Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Political Engineering for Women in Indonesian Governance

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 257-264, 7 gambar, 3 tabel, 11 daftar pustaka.

The rising number of women in parliament is a vital entry point to involve more women politics. This factor opens discourse, engagement and active participation that can elevate women's political bargain in negotiation room. It is in the long run will affect the embodiment of critical mass which is believed to increase factor of women's representation in policies decision. Mainstreaming gender in governance shall be supported by political engineering, institutional setting, roles of the game, and an open and democratic system. Democratic political setting is the pre-requisite to create equal representation and participation for women and other minorities group in governance politics.

Keywords: women, politics engineering, critical mass, governance.

Peningkatan persentase perempuan dalam parlemen adalah *entry point* bagi keterlibatan yang lebih aktif dan konkrit bagi kelompok perempuan secara keseluruhan. Peningkatan ini akan membuka ruang diskursus dan menguatnya posisi tawar kepentingan kelompok perempuan dengan membentuk *critical mass* yang diyakini penting untuk bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Faktor kultural penting dalam mempengaruhi *politics of presence* dari kelompok perempuan. Perihal pengarusutamaan gender dalam tata kelola ini harus didukung dengan *setting* kelembagaan, yang berwujud pada aturan main, *institutional engineering* dan pembuatan serta penjaminan atas aturan main politik yang lebih terbuka dan demokratis. Setting politik demokratis adalah prasyarat terciptanya representasi dan partisipasi kelompok perempuan secara kuantitatif dan substantif dalam tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: perempuan, rekayasa politik, massa kritis, tata kelola.

Mariana Amiruddin. Komisioner Komnas Perempuan. Jl. Lathuhary No.4B, Menteng, Jakarta 10310. Telp.: (021) 3903963

Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi

Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 265-270, 1 tabel, 3 daftar pustaka.

Indonesia urgently needs national women's machinery, like ministry of women and commission for women. Beijing Platform for Action had been adopted by the fourth conferenc of women in September 1995 giving specific attention to national women's machinery in implementing gender mainstreaming at all levels in national development. This machine coordinates and supports all policies regarding strategic decisions and real actions. In July 2004 ECOSOC adopt resolution on national women's machinery as key actor in bureaucracy reformation. The resolution recommends that national women's machinery is being put at the highest level to invest authority and equal power to fulfill the mandates.

Keywords: national women's machinery, women ministry, commission for

women.

Indonesia masih membutuhkan "*National Women's Machinery*"— seperti institusi berbentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Beijing Platform for Action yang diadopsi oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (September 1995) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya "mesin nasional" dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan. Hal ini mendefinisikan peran utama mesin nasional berupa pusat kebijakan unit koordinasi dalam pemerintahan yang tugas utamanya adalah: mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan tujuan strategis yang diusulkan dengan tindakan nyata. Pada bulan Juli 2004, ECOSOC bahkan mengadopsi resolusi ini untuk memperkuat peran "mesin nasional" sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pengarusutamaan gender. Komisi dalam konferensi tersebut merekomendasikan agar "mesin nasional" ditempatkan pada tingkat tertinggi pemerintahan dan diinvestasikan dalam bentuk kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi mandat mereka.

Kata Kunci: mesin nasional, Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan.

Ryan Sugiarto. Program Magister Sains Psikologi, Universitas Gajah Mada . Jl. Sosio Humaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281. Telp. +62 274 550435

Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern

Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 271-277, 12 daftar pustaka.

Genealogy and history of queens in Nusantara had been written in golden ink. Their histories across Nusantara were not only an accumulation of wives or ruler, but also inhibited the magic-realism of modern Indonesian society. However, the minimum or rare documents of Nusantara's women leadership had blurred their real representation and strong leadership. This paper investigates the history, roles, status and profiles of women's leader. This paper aims to support current political situation specifically on the tradition of writing woman's her-stories. From this perspective legitimacy of power from history are taken to support women's leadership in current modern Indonesia state.

Keywords: queen, Nusantara, myth, state.

Sejarah panjang kekuasaan dan kepemimpinan perempuan nusantara mencatat hasil yang gemilang. Sejarah perempuan penguasa tidak hanya menempatkan dirinya sebagai ratu atau penguasa kerajaan, tetapi juga memenuhi ruang kesadaran magis masyarakat melalui mitos. Namun minimnya literasi mengenai peran dan sejarah kuasa perempuan yang ditulis oleh sejarawan, membuat bangsa ini seolah tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Tulisan ini bermaksud mengkaji kuasa perempuan nusantara dan sejarah kekuasaan perempuan Indonesia yang berlangsung berabad silam dan mitos yang hidup hingga saat ini. Tulisan ini diharapkan mampu memberi ruang untuk menengahkan pengalaman perempuan nusantara memimpin negeri. Sekaligus mendorong kemungkinan penulisan sejarah yang berpihak pada perempuan. Sehingga sebagai sebuah bangsa, memiliki kajian yang berpijak pada khasanah perempuan nusantara untuk memberi dasar pada kekuatan politik perempuan hari ini.

Kata kunci: ratu, Nusantara, mitos, negara.

Triyono Lukmantoro. Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang. (Jalan Prof. Soedharto, SH Tembalang), Semarang, Jawa Tengah 50275. Telepon:+62 24 8414513

Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja

Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 279-287, 25 daftar pustaka.

Media representations of women who have positions as ministers in President Joko Widodo's Kabinet Kerja become phenomenon. On one side, media exposes aspects of successful side of female ministers. Media cited the statement of Presiden Jokowi that there are two "first woman" as appreciation. But, on the other side, media representations have masculinity character. For female minister who has "unique body performance", the exposure of media are so excessive. Media had been trapped in the calculation of news values as reference for gathering news. The news values have been controlled by masculinity discourse that legitimate patriarchal regime of truth.

Keywords: media, representations, woman, masculinity.

Representasi media terhadap kehadiran perempuan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi fenomena tersendiri. Media banyak menyoroti sisi keberhasilan kalangan perempuan menteri. Media mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan ada dua "Perempuan Pertama" untuk memberi apresiasi. Namun, pada sisi yang lain, representasi media menunjukkan watak maskulinitas. Untuk perempuan menteri tertentu yang dianggap memiliki "penampilan tubuh yang unik", maka media memberikan sorotan yang berlebihan. Di sinilah media terjebak dalam nilai berita yang menjadi acuannya sendiri. Padahal nilai berita itu sudah dikontrol oleh wacana maskulinitas yang membenarkan rezim kebenaran patriarki.

Kata kunci: media, representasi, perempuan, maskulinitas

Kurniawati Hastuti Dewi. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl.Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. Telp.(021) 5225711, 5251542

Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 289-306, 4 tabel, 44 daftar pustaka.

This paper shows that the role and position of Indonesian women in local governance are improving gradually since the implementation of direct elections in 2005. The "structural opportunities" for women to be elected as local leader have increased under the direct elections. The number of women elected as local leaders has risen significantly during 2005-2014 periods. Female local leaders' profiles are diverse in terms of their socio-political background, individual capital and political parties, reflecting a new typology of female local leaders. The presence of female local leaders does not necessarily mean that they always advocate for women issues in their policy line, as this ideal condition depends on other influential factors. And yet, this paper suggests the declining trend of participation and opportunities of women in local governance as the new Local Government Act No. 23/2014 adopts the election of local government head via the Regional People's Representative Council to replace the earlier mechanism of direct election.

Keywords: women, governance, local direct election.

Tulisan ini menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia semakin membaik sejak diberlakukannya Pilkada langsung tahun 2005. Pilkada langsung telah menyediakan "struktur kesempatan" yang lebih besar kepada perempuan untuk menjadi pemimpin politik di daerah. Jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah meningkat signifikan selama kurun waktu 2005-2014. Profil perempuan pemimpin daerah lebih beragam dari segi latar belakang sosial-politik, modal individu, dan partai pengusung yang memperlihatkan kemunculan tipe-tipe baru perempuan pemimpin daerah. Keberadaan perempuan pemimpin daerah tidak serta merta menjamin kinerja dan pemihakan terhadap berbagai persoalan perempuan di daerah, karena hal ini tergantung pada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun demikian, tulisan ini juga menengarai tren kemunduran peluang dan partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan diberlakukannya kembali mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebagaimana tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23/2014.

Kata Kunci: perempuan, tata kelola pemerintahan, Pilkada langsung (Pemilihan Kepala Daerah).

Robert Endi Jaweng. Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta. Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980. Telp.: (62-21) 8378 0642/53

Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik

Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 307-315, 3 tabel, 12 daftar pustaka.

Desentralization and local autonomy marks the shift of power from centre to the locals. In the political transition landscape, the actual cause in Indonesia is the power relations that should investigate further dimension of gender, social, politics, and economy. Within this network and framework, women's leadership are hoped to nurture equality and prosperity for those being othered by development and growth. This paper concludes that executive leadership that promotes gender equality shall, foremost, promote concept of women's leadership which are not only due to inheritance but basic political infrastructure.

Keywords: decentralization, bureaucracy, female local leaders.

Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya tak sekadar menandai hadirnya momentum baru perubahan tata kelola pemerintahan di aras lokal. Dalam lanskap transisi politik, seperti kasus aktual di Indonesia hari ini, desentralisasi dan otonomi tersebut mesti lebih jauh dan mendasar lagi menjadi struktur perubahan itu sendiri, dan dalam tarikan nafas yang sama membuka kesempatan bagi transformasi struktural dan penataan ulang relasi kuasa (*power-relations*) pada matra gender, sosial, politik, ekonomi. Hanya pada struktur demikian, kepemimpinan perempuan menjadi lebih bermakna, sekaligus menjadi humus bagi tumbuh-mekarnya tokoh-tokoh perempuan di berbagai pelosok negeri untuk mengambil peran historis di daerah. Artikel ini bertolak dari proposisi dasar: meski hari ini muncul sederet tokoh perempuan memegang tampuk kepemimpinan eksekutif, namun mereka belum sepenuhnya melahirkan dan atau dilahirkan dalam ruang transformasi struktural dan tata relasi kuasa yang berubah.

Kata Kunci: desentralisasi, birokrasi, kepala daerah perempuan.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi *Jurnal Perempuan*.
Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,
12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

***Raison d'être* Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet
Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola
Pemerintahan**

***Raison d'être* of Mainstreaming Gender in 2014-2019
Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 317-326, 2 gambar,
18 daftar pustaka.

This research focuses on the presence of women in the Executive via institutionalism approach that methodologically realize that women's position in public is critically under-represented. Approach being employed is defending women and other minorities groups. This approach assume: 1) existential reason of politics is too masculine and unequally distributed among groups; 2) appreciating informal practice held by minorities groups; 3) committed to mainstreaming equality in supporting groups such as women, diffable groups, LGBT, and ecological justice.

Keywords: Executive, women, minorities, governance.

Kajian ini meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet dengan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatas dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis, kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: pertama, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktek yang menjadi *raison d'être* (alasan eksistensial) praktek politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (!)liyan dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. Kedua, memberikan penghargaan pada praktek-praktek informal dari proses-proses komunikasi dan tata-kelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal ini secara spesifik menginduk pada praktek-praktek masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. Ketiga, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain.

Kata kunci: Eksekutif, perempuan, minoritas, tata kelola.

Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan

Raison d'être of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance

Dewi Candraningrum

Pemimpin Redaksi *Jurnal Perempuan*

(dewicandraningrum@jurnalperempuan.com)

Naskah Diterima 31 Oktober 2014. Direvisi 5 November 2014. Disetujui: 9 November 2014

Abstract

This research focuses on the presence of women in the Executive via institutionalism approach that methodologically realize that women's position in public is critically under-represented. Approach being employed is defending women and other minorities groups. This approach assume: 1) existential reason of politics is too masculine and unequally distributed among groups; 2) appreciating informal practice held by minorities groups; 3) committed to mainstreaming equality in supporting groups such as women, diffable groups, LGBT, and ecological justice.

Keywords: Executive, women, minorities, governance.

Abstrak

Kajian ini meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet dengan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatas dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis, kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: pertama, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktek yang menjadi *raison d'être* (alasan eksistensial) praktek politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (l)iyian dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. Kedua, memberikan penghargaan pada praktek-praktek informal dari proses-proses komunikasi dan tata-kelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal ini secara spesifik menginduk pada praktek-praktek masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. Ketiga, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain.

Kata kunci: Eksekutif, perempuan, minoritas, tata kelola.

Pendahuluan

Tulisan ini akan meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet. Kajian singkat ini akan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatas dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis,

kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: *pertama*, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktik yang menjadi *raison d'être* (alasan eksistensial) praktik politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (l)iyian dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. *Kedua*, memberikan penghargaan pada praktik-praktik informal dari proses-proses komunikasi dan tata-kelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal ini

secara spesifik mengindik pada praktik-praktik masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. *Ketiga*, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain. Dengan membawa tiga dimensi tersebut, tulisan ini akan mengambil posisi-keputusan bagaimana akses perempuan menuju kabinet dan bagaimana jalan dibentangkan untuk memberikan para liyan akses yang adil atas praktik-praktik politik—tidak hanya dalam posisi inferior tetapi perempuan juga perlu berada dalam posisi kementerian portofolio strategis—dimana strategi pengarusutamaan gender dijangkarkan ke dalam sistem operasional eksekutif. Riset ini juga merupakan dokumentasi kajian *Jurnal Perempuan* atas *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2014 bersama beberapa ahli di bidangnya masing-masing.

Pengarusutamaan Gender dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sirimavo Bandaranaike terpilih menjadi perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri di Sri Lanka di tahun 1960. Sejak saat itu kurang dari 80 perempuan dari belahan dunia lain mencapai posisi eksekutif baik sebagai menteri, perdana menteri atau presiden (*The Economist*). Di tahun 1990 setidaknya ada 26 perempuan yang menduduki posisi eksekutif dalam kabinet-kabinet negara-negara di dunia, yang kemudian angkanya naik menjadi 37 perempuan di tahun 2000—yaitu mengalami kenaikan tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 60-an, 70-an, dan 80-an (UNDP, *Gender Leadership in Executive Report*, 2013). Meskipun demikian masih banyak negara yang harus bekerja keras untuk meruntuhkan “atap kaca” (kerap disebut sebagai *glass ceiling*). Atap kaca benar-benar pecah di Finlandia dimana tiga perempuan berada dalam pucuk pemimpin eksekutif. Jumlah perempuan dalam parlemen Denmark adalah 49 persen tercatat di akhir tahun 2013, demikian juga Swedia sejumlah 42 persen, angka yang sangat tinggi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sedikit retak di Inggris, dengan Margaret Thatcher menjadi contoh perdana menteri perempuan terkuat di jamannya. Dan atap kaca masih benar-benar utuh, dan tak pecah, karena Hillary Clinton gagal menjadi Presiden

di Amerika. Kajian *Jurnal Perempuan* 83 kali ini akan mengevaluasi kembali sistem politik, sistem pemerintahan, stereotip perempuan pemimpin, dan pemahaman atas karakteristik dan kepribadian pemimpin dari kaca mata ilmuwan politik, pemerintahan dan sosiolog dalam sumur paradigma filsafat feminisme.

Representasi perempuan dalam politik sesungguhnya tidak boleh hanya melulu pada persoalan gender (secara esensialis menyangkut “kuota perempuan”), tetapi harus juga merangsek dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, yaitu kabinet, dalam konteks internasional dan nasional atas posisi profesional politisi perempuan. Ini memiliki makna lebih luas lagi, yaitu **pengarusutamaan gender dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan**. Tulisan ini menyadari bahwa sistem pandangan dunia politik kenegaraan, eksekutif dan birokrasi masih menampilkan wajah lama yang melanggengkan ketidakadilan gender. Wajah kabinet baru Indonesia tahun 2014-2019 harus memperhatikan secara lebih spesifik konteks profesi, struktur kekuasaan, dan karakteristik profesi perempuan yang sesungguhnya “berbeda” dari laki-laki, dan pada skala tertentu, atau lebih sering, perempuan dipaksa menjadi “laki-laki” dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Tata kelola pemerintahan yang mempromosikan kesetaraan gender menyadari perbedaan karakteristik ini dan tidak memaksakan generalisasi dalam pandangan filosofisnya.

Dunia mencatat bahwa perempuan dapat lebih mudah menguasai level parlemen daripada level eksekutif. Padahal level kepresidenan memiliki otoritas lebih tinggi dan lebih independen dalam sistem kekuasaan daripada sistem parlementer. Dalam buku terbaru karya Farida Jalalzai berjudul *Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide* (Oxford University Press, 2013), dia menemukan lebih dari 300 perempuan dunia telah menjalankan tugas-tugas eksekutif dan hanya 21 perempuan yang mampu menduduki posisi tertinggi. Tulisan ini juga mengungkap hanya 16 perempuan yang bisa mencapai posisi kepresidenan. Dari angka ini masih banyak perempuan yang hanya menjadi bayang-bayang dari pemimpin laki-laki di sampingnya, atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau klan keluarganya. Meskipun banyak tantangan yang melawan perempuan naik dalam posisi kekuasaan

kenegaraan, tetapi perempuan dapat menghadapi kesulitan ini, terutama dalam konteks politik yang tidak stabil dimana perempuan memiliki hubungan darah dengan oligarki kekuasaan rezim tertentu. Meskipun ini merugikan perempuan, tetapi paling tidak perempuan mendapatkan pengalaman-pengalamannya yang berbeda dari sebelumnya dimana perempuan merupakan lawan-inferior yang tidak berpengalaman sama sekali dalam hal politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Dalam bukunya Jalalzai menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan lebih bersifat konsensual daripada laki-laki, dimana laki-laki mempertahankan kontrol dan kekuasaan (2013: 43). Hal ini juga menjelaskan bagaimana kemudian kepemimpinan perempuan dalam eksekutif lebih bersifat lunak dan kolaboratif. Temuan Jalalzai ini kemudian mengkonfirmasi bagaimana kepemimpinan juga tak lepas dari karakter gender masing-masing individu, sebagai sebuah temuan yang umum, meskipun tidak bisa dipaksakan menjadi untuk 'siapa saja' karena sifatnya yang kontekstual.

Beberapa kajian sebelumnya mewartakan bahwa banyak kepemimpinan perempuan dalam posisi eksekutif baik level nasional, provinsi dan kabupaten merupakan kabar gembira, karena menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang diraih perempuan pemimpin. Indonesia mencatat Walikota Surabaya Risma, Bupati Kebumen Rustri, meskipun juga mencatat kegagalan terbesar Gubernur Banten Ratu Atut yang terjerat kasus mega korupsi demikian juga Bupati Karanganyar Rina Iriani. Partisipasi politik dan kenegaraan perempuan sebagaimana laki-laki juga mengalami naik-turunnya, volatilitas gender. Catatan-catatan korupsi juga menjadi pekerjaan tersendiri dalam diskursus kepemimpinan perempuan dalam lingkup eksekutif. Kajian menunjukkan bahwa perempuan harus berjuang lebih keras dari laki-laki dalam meraih posisi eksekutif, tidak hanya latar belakang pendidikan, lingkaran keluarga, pengaruh keluarga, dan lain-lain, tetapi juga harus berjuang melawan segala 'prasangka' bahwa perempuan tidak memiliki 'kemampuan asal' (kerap disebut takdir) dalam memimpin. Asia dan Amerika Latin adalah rumah dimana tradisi atas perempuan yang tidak memimpin ini dipelihara. Hubungan darah, situasi tidak stabil, dan transisi demokrasi dalam banyak kasus telah menolong perempuan memasuki tangga paling puncak kekuasaan eksekutif – sebagai janda perdana menteri atau sebagai anak perempuan seorang presiden yang

terbunuh, misalnya, kemudian perempuan duduk dalam kursi kekuasaan, kemudian mengenal secara tak sengaja tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan betapa lemahnya perempuan yang menjadi pemimpin berasal dari akar organik, karena dia memang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas menjadi pemimpin. Bahkan juga dipercayai, bahwa meskipun perempuan memimpin, dia selalu tak dipercaya akan berhasil memimpin. Dus, perlu ada pengarusutamaan mekanisme politik bagi perempuan untuk dapat mencapai jaring dalam habitus tata kelola pemerintahan, baik secara filosofis, kesejarahan, paradigmatis dan praktis, terutama bagi politisi perempuan rentan yang berasal dari keluarga tidak stabil secara ekonomi-politik dan tidak masuk dalam lingkaran oligarki politik tertentu atau dapat kita sebut sebagai 'politisi perempuan organik'. Negara dan partai politik bertanggung-jawab atas para perempuan aktivis politik brilian tersebut dengan kehendak-kehendak politiknya, baik formal via kebijakan dan informal via praktik budaya politik.

Paritas Gender dalam Kabinet

Semakin banyak perempuan menduduki posisi pemerintahan, setidaknya telah ada 20% perempuan menduduki posisi paling puncak di negara-negara mereka sampai dengan tahun 2014 ini (dalam *Catatan Jurnal Perempuan* Ed 82/ Agustus/2014). Dan dekade terakhir menunjukkan bahwa 'paritas gender' yang dimintakan oleh masyarakat modern merupakan penentu utama bagi perubahan, transformasi, involusi dan evolusi gender dalam kabinet. Merkel yang dari kubu politik 'kanan' di Jerman, dapat naik, diantaranya, bukan karena dia perempuan, tetapi karena ada tekanan dari masyarakat tentang pentingnya perempuan menduduki portofolio strategis, sebagai Kanselir. Popularitas 'paritas gender' dalam pemerintahan marak tidak hanya di Perancis, Finlandia, Chile, Swedia, Finlandia, dan beberapa negara Skandinavia, Afrika, dan Amerika Latin lainnya – yang menuntut kuota gender, jumlah perempuan, dalam kabinet secara seimbang, sama halnya dengan kuota 30% perempuan dalam parlemen kita. Pekerjaan rumah Indonesia selanjutnya adalah menuntut kuota itu juga dalam struktur birokrasi secara umum. Jika European Union telah melangkah sebelumnya, dan yang paling kini, meminta kuota 14% kuota gender dalam CEO perusahaan-perusahaan – tak ada salahnya ini menjadi agenda penting gerakan perempuan ke depan di Asia Tenggara dan Indonesia secara lebih

spesifik. Memahami dimensi gender dalam kabinet masih belum banyak digali, baik dalam riset maupun dalam formulasi kebijakan. Indonesia telah mengupayakan banyak perihal jika mengenai parlemen, baik via kuota dan kajian-kajian baik sistem parlementer dan presidensiil, seperti kajian perihal jumlah perempuan dalam parlemen (Vermonte et al, 2014).

With Angela Merkel as the country's first female Chancellor, we might expect her to select more women for cabinet positions. On the other hand, parties of the left in general promote more women and Merkel is from a party of the right. Furthermore, since at least the mid-1980s, German Chancellors have come under public pressure to select more women for their cabinets. Thus, if Merkel has selected more women for cabinet, it may be because of changing norms over time rather than because she is female. (Wiliarty, 2014: 2)

Tulisan ini mempertanyakan bagaimana proses rekrutmen kabinet memposisikan gender dalam struktur pencalonan dan pemilihan. Peran, kekuatan, kapasitas yang berbeda antara perempuan, laki-laki, dan minoritas apakah juga menjadi tolok-ukur dan indikator dalam proses rekrutmen. Tidak hanya berhenti pada rekrutmen tetapi juga mencurigai dan memaparkan bagaimana distribusi kekuasaan dalam internal terjadi secara timpang atau adil? Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme, kajian ini membawa ideologi feminisme secara serius karena menyadari pra-kondisi fakta politik yang patriarkis dan tak mengabarkan naskah-naskah adil—baik secara gender dan ekologis. Kajian ini berangkat dari premis bahwa institusi telah tergenderkan terlebih dahulu, sehingga perlu ada intervensi.

Tulisan ini memiliki tugas untuk menjelaskan bagaimana 'ide birokrasi' juga telah tergenderkan, terbedakan, ter subordinasi—mengalami konstruksi ketakadilannya. Ini merujuk pada asumsi dan harapan bahwa kapasitas, kekuatan, dan kepatutan peran perempuan tak kompatibel dalam dunia politik, yaitu merujuk pada divisi pekerjaan yang meletakkan perempuan pada beban-beban pemeliharaan dan bukan beban kepemimpinan yang kemudian ditarjamahkan ke dalam peluang-peluang politik pemerintahan. Jika diskusi ini diteruskan pada minoritas seksual, difabel atau masyarakat adat, misalnya, maka subordinasi dan inferioritas 'ide birokrasi' bertambah lebih tidak berpihak lagi, karena

mereka diletakkan dalam posisi yang mendapat perlakuan-perlakuan "di"—dengan mengabaikan kapasitas mereka dalam proses-proses negosiasi politik. Memahami perihal ini, dalam muaranya, memiliki makna sangat penting sekaligus strategis dalam menyusun kabinet dan intervensi birokrasi.

Kementerian Perempuan? *Raison d'être*

Eksekutif merupakan lokus politik paling visibel dimana kekuasaan sistem politik bekerja secara tak adil bagi para liyan. Fakta ini mewartakan bahwa tak serta merta jika perempuan berada di parlemen lebih banyak, maka advokasi kebijakan kesetaraan akan ikut dijalankan—jika perihal kuota serupa tak dijalankan dalam kabinet pemerintahan. Tren mutakhir menunjukkan bahwa jika perempuan tak ada dalam kabinet, jika perempuan tak memiliki kementeriannya sendiri, maka akan sulit bagi perempuan memperjuangkan naskah kesetaraan dan keadilannya sendiri (Laver & Shepsle, 1994: 3). Presidensialisasi politik membuat kekuasaan berpusat di tingkat elit kabinet bersama kementeriannya. Jika perempuan tak menempati portofolio strategis sekaligus tak memiliki kementeriannya sendiri, besar kemungkinan upaya-upaya keadilan akan menemu banyak kendala—baik dalam aras kebijakan gender, anak, dan kelompok rentan/liyan (Poguntke & Webb, 2005).

Dalam kajian Krook dan O'Brien (2012: 843) tentang akses perempuan dalam kabinet pemerintahan, keduanya menyadari dan menemukan bahwa aturan, praktik, intervensi pengarusutamaan memiliki peran strategis dalam mengkonfigurasi distribusi kekuasaan. Institusi membentuk prospek perempuan dalam kekuasaan, dan institusi juga mampu menghadihkan desain dan insentif terhadap prestasi-prestasi perempuan dan kelompok rentan. Dari 117 negara yang mereka teliti, ditemukan bahwa peran elit politik juga bermain vital dan amat menentukan (851). Dari temuan ini Indonesia dapat berangkat untuk menentukan nasibnya bahwa analisis eksistensial (*Raison d'être*) pos kementerian perempuan dan kuota gender dalam kabinet memiliki peranan strategis jika benar negara ini hendak melanjutkan nalar adil gender. Matra keadilan dan kesejahteraan sosial tak mungkin ada dan terwujud tanpa keadilan gender. Dan keberadaan kementerian ini menjadi satu portofolio strategis bagi hajat seluruh warga negara. Tulisan ini menekankan juga pentingnya relevansi antara kepemimpinan perempuan politisi di parlemen dan di eksekutif—

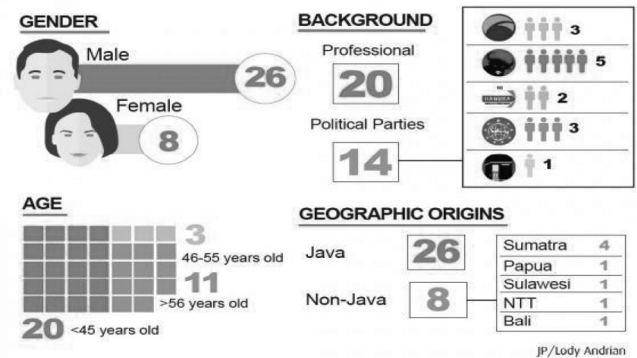
yaitu tak melulu perihal kuota tetapi juga tipe portofolio, tendensi, kekuasaan, prestis dan pengaruh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perempuan. Dus, perspektif 'perempuan' diperlukan bagi para pemimpin perempuan dan tidak sekadar perempuan (Krook & O'Brien, 2011; Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson, 2009).

Karena fokusnya pada distribusi kekuasaan, pengaruh dan praktik-praktik kekuasaan yang melibatkan pengalaman membuat keputusan dalam pemerintahan, dimensi inferioritas gender, baik perempuan dan minoritas liyan perlu mendapatkan intervensinya—yaitu pengarusutamaan strategi gender. Beberapa kajian menemukan bahwa praktik organisasi dan institusi mempengaruhi cara perempuan beradaptasi, bekerja dan mengasah pengalaman memimpin. Annesley dan Gains (2010) menunjukkan bahwa rekrutmen dan kemampuan perempuan memimpin dalam kabinet berkaitan erat dengan topangan institusi atas kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender. Dalam hal ini perempuan lebih percaya diri, lebih kapabel, dan lebih leluasa mengekspresikan kehendak dan keputusan politiknya. Hierarki patriarki dalam kabinet yang menguasai dunia telah menyebabkan perempuan terhimpit atap kaca sekaligus terbebani oleh tugas-tugas domestik yang kegagalannya membawa dampak psikologis cukup berat dalam kehidupan kariernya sebagai perempuan politisi. Proporsi perempuan, minoritas seksual dan para liyan dalam kabinet memainkan peran penting dalam gaya sebuah kabinet mengeksekusi birokrasi pada level nasional dan daerah. Nasib perempuan, nasib kelompok rentan, berada dalam keputusan-keputusan birokrasi atas matra gender ini. Tentu kabinet Indonesia baru tidak mau disebut sebagai kabinet baru yang buta gender (*gender-blind cabinet*), bukan?

Status Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019)

Pada Minggu 26 Oktober Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengukuhkan Kabinet Kerja yang terdiri dari 34 kementerian (lihat bagan *Cabinet in Numbers* dan *Peta Kabinet Kerja* di bawah). Dari 34 portofolio, 8 diisi oleh perempuan—yang merupakan kenaikan 100% dari kabinet SBY sebelumnya yang hanya berjumlah 4 perempuan (dokumentasi wawancara dengan perempuan menteri ada dalam rubrik Profil JP83 kali ini). Kedelapan perempuan menteri Kabinet Kerja adalah (1) Prof Yohana Susana

Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); (2) Dr Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup); (3) Prof Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan); (4) Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri); (5) Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial); (6) Rini M. Soemarno (Menteri BUMN); (7) Puan Maharani (Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan); (8) Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan & Perikanan). Paling istimewa adalah perempuan profesor pertama Papua, Prof Yohana Susana Yembise, terpilih menjadi menteri di KPPA. Kehadiran 23% perempuan dalam Kabinet Kerja menandakan era baru, karena ini merupakan kabinet pertama yang diisi dengan kuota lebih banyak perempuan daripada kabinet sebelumnya dalam sejarah Indonesia yang sarat dengan postur-postur patriarki.



Gambar 1. Kabinet dalam Angka

Investigasi atas keadilan deskriptif tersebut kemudian dielaborasi YJP dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bersama beberapa ahli di bidangnya pada Rabu 29 Oktober di kantor Yayasan Jurnal Perempuan. Kenaikan representasi deskriptif atas keadilan gender dalam kabinet dipuji sebagai salah satu faktor penting dalam mengukur berhasilnya mesin gender nasional (kerap disebut sebagai *national women machinery*). Dalam FGD ini juga dinarasikan tentang pentingnya melakukan investigasi lebih lanjut atas keadilan substantif pengarusutamaan perspektif perempuan dalam kabinet.

Dalam pemaparannya di FGD YJP, **Nur Iman Subono** (pengajar FISIP, Univ Indonesia) menjelaskan bahwa secara teoretis, kuota perempuan dalam kabinet selalu lebih sedikit dibandingkan di parlemen dan situasi ini hampir merata di seluruh dunia. Pola di kabinet memiliki banyak variabel, misalnya kedekatan, kapasitas, prestasi, dan pendidikan. Lebih

jauh Subono memaparkan alat ukur kinerja ini dapat dinarasikan dalam tiga indikator, yaitu pertama, sikap politik (*attitude*), misalnya ada stigma dan stereotipe buruk terhadap perempuan menteri, misalnya kasus tato dan rokok menteri Susi—media terlihat sekali amat seksis dan memakai ukuran patriarki-maskulin dalam memandang perempuan. Alih-alih melihat prestasi, dedikasi, dan karya—tetapi justru lebih banyak bermain dalam politik simbol. Kedua, kebijakan (*policy*), yaitu sejauh mana representasi substantif pengarusutamaan gender tercapai. Apakah kabinet ini kinerjanya ramah dan berspektif gender atau tidak? Ketiga, legitimasi (*legitimacy*) adalah akumulasi dukungan kabinet ini atas sensitifitas gender.

Direktur Pascasarjana Univ Indonesia, Prof **Sulistiyowati Irianto** menambahkan bahwa istilah *feminist victory* dalam kabinet kerja ini sebenarnya masih belum selesai—karena perempuan yang mana dulu yang dipilih dan diuntungkan dari kabinet ini. *Which women?* Ini adalah pertanyaan penting dalam mengukur kinerja kabinet pada seratus hari dan tiga bulan mendatang. **Imelda Sari** (perempuan politisi Partai Demokrat) menggarisbawahi tentang

mencapai *feminist victory* tersebut. Anggaran harus diinvestigasi, direncanakan dan dieksekusi supaya dapat memenuhi aspek adil gender dan proyek-proyek kesetaraan. Perempuan menteri diharapkan dapat memberikan terobosan, karena dalam birokrasi terutama untuk sektor yang disatukan dan yang dipisahkan penganggarannya akan butuh proses yang panjang termasuk perubahan struktural budaya birokrasi. Perempuan menteri, dalam posisi ini, kemudian tidak hanya menjadi dirinya sendiri tetapi sebagai pejabat publik dengan seluruh resiko tanggung jawab birokrasi.

Rocky Gerung (departemen Filsafat Univ Indonesia) menambahkan paparan bahwa indikator gender dalam kabinet atas status perempuan juga diukur oleh isu kualitas dan legitimasi. Satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengawasan. “Genealogi kekuasaan yang penting dirunut adalah: sudah cukup otonomkah Presiden mengoperasikan kabinet ini? Musuh pertama Kabinet Kerja Jokowi-Kalla adalah feodalisme dan hierarki partai. Musuh kedua adalah pencapaian: bisakah kabinet kerja melampaui capaian SBY dalam soal pendapatan perkapita yang naik tiga kali lipat

dalam sepuluh tahun terakhir? Maka dari itu, relawan berhak mengkritisi, merekalah yang selama ini berhasil mengawal Jokowi hingga posisi sekarang. Mereka sebenarnya berhak mendapatkan penghargaan. Tetapi sayang sekali kurang terakomodir dalam ruang kekuasaan kabinet sekarang,” demikian paparnya selanjutnya. Rocky Gerung menambahkan bahwa sosial-media sekarang telah berfungsi apik sebagai kontrol, pengawal, dan pelindung ideologi gerakan. Dan terbukti cukup efektif. “Kita harus menelaah asal usul kekuasaan, yang menentukan daya kontrol kinerja kabinet kerja. Aktivitas oligarkis itu *built-in* dalam sistem, melekat dalam kultur, dan ini adalah musuh kita bersama,” jelas Rocky Gerung. **Eva Kusuma Sundari** (partai

PDIP) memaparkan bahwa selama Jokowi menjadi Gubernur DKI, nyata terlihat bahwa Jokowi amat independen dalam membuat pelbagai gebrakan kebijakan dan eksekusi birokrasi, dan ini menunjukkan bahwa oligarki partai, dalam skala tertentu kadang tidak mampu bermain di bawah



Gambar 2. Perempuan Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla

Sumber: Jawa Pos

pentingnya peran perempuan yang duduk dalam posisi strategis di kementerian terutama menyangkut penganggaran yang lebih teliti dan detil termasuk dalam proses rekrutmen dalam birokrasi. Dari anggaran, yaitu *gender budgetting*, dapat diukur keberhasilan strategi pengarusutamaan gender, dus

kepemimpinan Jokowi. “Harapan ini tentunya adalah juga harapan untuk kabinet kerja 2014-2019 mendatang”, papar Eva.

Dalam merespons oligarki partai, **Pinky Saptandari** (Dept Antropologi, FISIP Universitas Airlangga) menjelaskan tentang ketersembumyian kepemimpinan perempuan. Kabinet ini telah melakukan dekonstruksi kepemimpinan maskulin, yaitu dengan memilih perempuan dengan *triple-minorities* seperti Yohana, yaitu pertama dari Papua, kedua dia adalah perempuan; dan ketiga dia adalah Kristen. Tiga faktor ini menunjukkan inferiornya posisi perempuan menteri yang ditunjuk, dus, sebagai tindakan revolusioner dan berani. Untuk kasus Susi, kabinet ini mendekonstruksi pandangan bahwa menteri haruslah profesor, tetapi Susi bahkan tidak lulus SMA, misalnya. Ini merupakan keputusan yang amat berani dalam mengukur kapasitas, karena terbukti Susi banyak memiliki karya sebelumnya dalam sepak-terjangnya. Susi tercatat sebagai perempuan pertama, bahkan orang pertama, yang turun di wilayah tsunami Aceh waktu itu dengan pesawatnya Susi Air, dan lain-lain. Dekonstruksi Jokowi-Kalla tidak hanya perihal pemilihan perempuan menteri, tetapi juga sikap terhadap perempuan menteri yang tercermin dari prosesi pengumuman dan pelantikan kabinet kerja. Seperti dipaparkan peneliti independen dan juga feminis **BJD Gayatri**:

“Protokol istana sejak ORBA mewajibkan perempuan memakai rok sebagai pakaian sopan. Hal itu diubah oleh Jokowi. Menteri perempuan boleh bercelana panjang. Tidak ada yang memperhatikan perubahan penampilan perempuan. Jokowi telah melakukan pelanggaran *khittah* berpakaian di Istana. Perempuan dibebaskan berpakaian. Bahkan Susi sangat provokatif menunjukkan tato, plus berbusana a la *haute couture*. Buat saya, sadar atau tidak, ini perbedaan besar bahwa dia tidak mengontrol tubuh perempuan. Ke depan, dia tidak akan mempersoalkan busana menteri-menterinya”.

Imelda Sari (partai Demokrat) menambahkan bahwa dalam protokoler istana sejak 2004 para menteri perempuan dibebaskan memakai celana panjang. “Sejak era Gusdur, perempuan ke istana negara perlahan-lahan dibebaskan dari kewajiban mengenakan rok. Juga dalam sidang kabinet, misalnya Sri Mulyani, Mari Elka, Siti Fadhillah,

mereka suka memakai celana panjang. Kemudian di era SBY batik dipopulerkan di istana”, paparnya. Menurut **Eva Kusuma Sundari** (partai PDIP) perihal ini merekonstruksi ulang tentang ide dan citra perempuan. “Ini perlu diagendakan dan bukan sekadar aksi reaktif. Secara pribadi saya senang dengan Jokowi yang telah mendekonstruksi protokoler istana. Misalnya saat pelantikan, 700 orang relawan diperbolehkan masuk istana, dan ini merupakan tradisi baru yang kemudian membuat pengawal kelabakan. Jokowi sangat *simple* dan *action-oriented*”, terang Eva. Secara eksplisit sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa perempuan harus diperbanyak dalam kabinet (lihat Wawancara Jokowi dalam JP 82 *Dokumentasi Pilpres: Pemilu, Agama dan Status Perempuan*).

Eva Kusuma Sundari lebih jauh menerangkan bahwa Jokowi berkomitmen untuk kementerian KPPA akan diberikan ke perwakilan Papua, menimbang KPPA sebagai sektor sensitif gender dan mengurus persoalan minoritas. Politisi lulusan University of Nottingham dan The Hague ini selanjutnya memaparkan:

“Dalam kongres PDIP, Mega secara khusus menginstruksikan agar seluruh bupati dari PDIP punya program khusus menanggulangi persoalan angka kematian ibu dan bayi. Secara umum, pencapaian Jokowi sebagai terobosan dapat dilihat dari aspek memperbanyak perempuan di kabinet dan ke depannya, keberanian Jokowi tidak terganggu oleh pertimbangan lain. Hal itu sudah ditunjukkan misalnya dengan memasukkan Susi. Disadari atau tidak, telah terjadi dekonstruksi konsep citra perempuan berprestasi yang tidak lagi identik dengan gelar akademik atau cara berpakaian, misalnya”.

Atnike Nova Sigiro (dari partai SRI-Serikat Rakyat Independen) mengutarakan bahwa tiga faktor yang menentukan derajat kebijakan kabinet kerja adalah (1) Fiskal (ekonomi makro, bisnis di luar dan dalam); dan (2) ideologi konstitusi, untuk menjalankan program yang dilaksanakan (yaitu, *Nawacita*). (3) Politik domestik—seperti oligarki Teuku Umar (ref, partai PDIP). Tiga hal ini membentuk struktur dan karakter kabinet kerja. “Dari tiga Menko Bidang Ekuin (*Menteri Koordinator Bidang* Ekonomi, Keuangan, dan Industri) ditentukan oleh konstrain fiskal yang tidak boleh memilih tim lemah yang dikontrol

ologarki politik. Bidang Maritim merupakan uji coba menarik, ditentukan oleh perencanaan sesuai kampanye yang menyesuaikan dengan karakter pembangunan Indonesia. Bidang Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan) sebagai dasar bagaimana rezim berkuasa harus menentukan stabilitas melalui menko ini. Puan sebagai menko hanya merupakan *power-sharing* kepemimpinan Jokowi. Sebagai Menko terbanyak ini diserahkan atas dasar oligarki atau politik domestik. Inilah catatan lemah dari kabinet Jokowi”, terang Atnike. Atnike memaparkan lagi:

“Pasca pengumuman, sejumlah Koalisi LSM mempermasalahkan isu HAM, hukum dan lingkungan. Sorotan atas kabinet sekarang justru bukan pada perempuannya: tetapi bidang keamanan, yang dipegang oleh militer bukan sipil dan Menhan lebih senior daripada Menkopolkam (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan). Sedangkan Bidang Ekonomi dinilai profesional. Para aktivis lingkungan kecewa, penempatan Siti Nurbaya menimbulkan ketidakpuasan. Untuk Susi, aktivis dari gerakan nelayan melihat kiprah Susi dari perspektif bisnis. Aktivis gerakan lingkungan lebih kecewa dibandingkan aktivis HAM. Sebelum pengumuman kementerian, aktivis sektor HAM sudah melakukan kampanye gencar untuk mencegah orang-orang bermasalah supaya tidak masuk, misalnya kampanye di media-sosial. Sedangkan aktivis gerakan lingkungan tidak tahu siapa yang harus dicegah karena tidak ada “informasi” (red, latar belakang para menteri) mengenai hal ini”.

Kritik atas kabinet baru diutarakan oleh **Melli Darsa** (pendiri Law Firm Melli Darsa & Co.) yang memaparkan bahwa peningkatan angka menteri perempuan secara statistik harus dihargai. Delapan perempuan menteri sebagian besar menempati posisi cukup strategis. Susi yang kontroversial pun ternyata banyak disukai dan menjadi media-darling, meskipun tetap ada kelompok yang nyinyir dan melakukan media-bully. Pengangkatan Susi menunjukkan bahwa perempuan dihargai dari prestasinya. Fenomena perempuan menteri merupakan pendobrakan kabinet Jokowi-Kalla atas tiga stereotype perempuan yaitu, (1) perempuan sebagai orang tua tunggal; (2) perempuan dalam perkawinan campuran; dan (3) perempuan sebagai breadwinner dalam keluarga (dilihat dari segi pajak dan aspek otonomi

mengambil keputusan terkait dirinya sendiri). “Skala politik masih menunjukkan adanya patronase. Ada bidang yang secara tradisional perempuan lebih nyaman dan terbiasa, misalnya Kementerian Kesehatan. Terkait Rini, Melli Darsa mengungkapkan bahwa sekarang perempuan yang berkualifikasi, yang bahkan lebih baik dari dia atau lebih berprestasi ada dan nyata di tahun-tahun terakhir. Namun yang menggembirakan dengan Rini memegang posisi Menteri BUMN adalah diharapkan bisa meningkatkan jumlah direktur perempuan dan komisaris perempuan di BUMN, mengingat perempuan yang memenuhi kualifikasi banyak, namun kepemimpinan BUMN umumnya didominasi laki-laki”, pungkasnya.

Manneke Budiman (FIB, Univ Indonesia) menjelaskan tentang pentingnya peran ibu Negara, yaitu Iriana. Tulisan dan riset tentang ini ada dalam Topik Empu Gadis Arivia di JP 82. Menurut Manneke Budiman: “Pertama, mengingat sosok Ani dalam pemerintahan SBY yang sangat menentukan kebijakan SBY dan tim kerjanya. Makin ke depan, ibu negara akan menjadi pusat perhatian. Yang kedua, agak frustrasi membaca kekecewaan berbagai kelompok. Akumulasi kekecewaan ini menyebabkan nilai kabinet memiliki nilai 6,5. Sikap yang mengarah pada *Self defeating* seperti ini, yang bisa menafikan kerja dan terobosan kabinet ini, ironisnya datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Pekerjaan oposan di KMP (Koalisi Merah Putih) bisa-bisa ‘diambil alih’ oleh relawan dan pendukung yang bisa jadi sangat tidak toleran dan tidak bersabar terhadap kabinet. Secara kuantitas, saya ambivalen menyikapi berapa mestinya jumlah perempuan dalam kabinet. Jika ada dua saja, Retno dan Susi, sebenarnya sudah cukup daripada ada delapan tetapi tidak mengangkat citra perempuan dalam politik. Tapi, sayangnya, ada Puan. Saya berharap kedelapan perempuan ini tidak akan membiarkan diri menjadi sasaran tembak oposan, tetapi justru menjadi tameng yang efektif bagi setiap tembakan ke presiden. Meskipun tidak semua posisi yang dipegang penting namun para perempuan ini akan menjadi parameter penting dalam pertarungan apakah kabinet Jokowi berhasil atau tidak” papar Manneke.

Penutup: Posisi Perempuan? Nalar Keadilan

Tulisan ini mengambil posisi bahwa gerakan perempuan perlu terus-menerus menginterogasi peraturan-peraturan baik formal dan informal dimana dinamika gender memainkan peranan penting dalam mengatur urusan separuh warga

negaranya, yaitu perempuan. Praktik-praktik informal ini merupakan praktik tersembunyi yang memainkan peranan krusial dalam menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tak boleh berkuasa. Kecurigaan atas cara kerja institusi dalam memperlakukan pelbagai jenis kelaminnya merupakan arena kekuasaan yang dapat berakhir tidak adil, semena-mena, bias, dan melanggar hak asasi manusia. Keberpihakan atas perempuan, anak dan para liyan merupakan intervensi birokrasi yang menginduk pada hukum dasar sebuah negara. Di kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, dalam temuan Claudia Derichs (2013), perempuan menempati posisi-posisi eksekutif puncak karena terlahir dalam dinasti politik, seperti sebagai istri, anak perempuan, saudara perempuan, cucu, dari tokoh puncak seperti presiden, perdana menteri, atau pimpinan informal keagamaan lain. Di Indonesia kita mengenal Megawati karena Sukarno, mengenal Alissa Wahid karena Gus Dur, dan lain-lain. Jeffrey Winters dalam wawancaranya dengan *Indonesian Feminist Journal* Ed 2 August 2014 menegaskan bahwa ini sebuah keberuntungan politis bagi perempuan, meskipun perspektif 'perempuan' perlu dimasukkan dalam dinasti-dinasti politik ini. Dengan 'hadiah' ini, perempuan dapat memaksimalkan kebermanfaatannya kekuasaan untuk keadilan yang lebih luas matranya, tidak hanya gender, tetapi juga ras/etnis, ekologis, sosial-ekonomi.

Kepatutan perempuan dalam lingkup kerja lelaki sering menemu jalan buntunya. Seperti dalam deskripsi Chappell (2006), bahwasanya perempuan harus mengadopsi kepatutan-kepatutan tertentu untuk dapat memasuki dunia politik. Di sini terlihat bahwa logika kepatutan juga tergenderkan—perempuan, minoritas seksual—adalah warga negara yang terdiskriminasi tak hanya dalam status-status formalnya tetapi juga status-status informal kepatutan (misalnya menyangkut cara berpakaian). Kurang lebih ada 348 dalam *Catatan Akhir Tahun Kompas Perempuan 2013* dipaparkan bagaimana perempuan terdiskriminasi karena peraturan kepatutan berpakaian. Perempuan dalam politik, tak hanya menyandang beban ganda, tetapi beban dengan 'matra-majemuk': jika dia gagal dalam rumah tangganya, disorotlah; jika dia korupsi, diperoloklah; jika dia gagal memimpin, dihinalah. Pemimpin laki-laki, biasanya, hanya akan disorot dalam perihal dua paling akhir. Perihal pertama, kegagalan dalam domestik rumah tangga, mereka tak mendapatkan beban.

Intervensi budaya birokrasi, selain kebijakan formal, bagi perempuan dilakukan, yaitu diantaranya, dengan memberikan peluang yang luas, tak terbatas, baik bagi perempuan dan laki-laki dalam parlemen dan eksekutif untuk menyandang tugas-tugas domestik sewaktu melaksanakan tugas-tugas publik. Misalnya parlemen EU menyiapkan ruang laktasi, atau memperbolehkan ibu politisi bekerja sambil membawa bayinya. Dan atau parlemen EU memberikan tunjangan dan waktu cuti lebih panjang dan kompensasi untuk ayah dan atau ibu yang memiliki bayi. Contoh penting ini mewartakan bagaimana negara dikonstruksi dan diintervensi dengan sistem birokrasi yang ramah anak, ramah pada yang rentan. Dan lain-lain. Kekakuan-kekakuan model birokrasi modern telah usang, dan telah pelan-pelan ditinggalkan oleh negara-negara yang 'maju' dan yang melahirkan demokrasi. Mengapa kemudian Indonesia enggan mengadopsi? Institusi dan mesin birokrasi diciptakan untuk memudahkan akta kemanusiaan dan adil gender bekerja, tetapi faktanya tidak demikian. Keduanya dikuasai oleh sistem dan tata kelola yang arogan, otoriter, kaku dan semena-mena pada perempuan, anak, mereka yang rentan, dan para liyan.

Dengan menginduk pada paradigma feminisme, status perempuan dalam kabinet, dan keberadaan kementerian perempuan dan kuota gender dalam kabinet kerja, memiliki makna strategis dalam melanjutkan mesin-mesin kesejahteraan (dus, *national women machinery*) bagi seluruh warga negara tak terkecuali laki-laki—karena semua laki-laki terlahir dari perempuan, ini memiliki makna bahwa AKI (Angka Kematian Ibu Melahirkan) dan kesehatan reproduksi, sebagai misal, bukan semata-mata urusan perempuan, tetapi urusan seluruh warga negara. Dus, *raison d'être* pengarusutamaan gender dalam kabinet, bukan semata-mata soal urusan perempuan, tetapi urusan seluruh warga negara Indonesia, yaitu memenuhi nalar keadilan.

Daftar Pustaka

- Annesley, C. and Gains, F. 2010. "The Core Executive: Gender Power and Change" in *Political Studies*, 58 (5): 909-29.
- Candraningrum, Dewi. "Interview with Jeffrey Winters: The Importance of Nation's Intervention on Electoral Quotas for Women" in *Indonesian Feminist Journal* Vol 2 No 2 August 2014.
- Chappell L. 2006. "Comparing Political Institutions: Revealing the Gendered 'Logic of Appropriateness'" in *Politics and Gender*, vol. 2, no. 2, pp. 223-234.
- Derichs, Claudia & Mark R. Thomson (Eds). 2013. *Dynasties and Female Political Leaders in Asia: Gender, Power and Pedigree*.

- Berlin: Litverlag.
- Escobar-Lemmon, Maria and Michelle M. Taylor-Robinson. 2009. "Pathways to Power in Presidential Cabinets: What are the Norms for Different Cabinet Appointments and do Female Appointees Conform to the Norm? A Study of 5 Presidential Democracies". Paper presented at the *Annual Meeting of the American Political Science Association*, September 3-6, Toronto.
- Brown, Anna. "Perceptions about women bosses improve, but gap remains" in *Pew Research Center*. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/08/07/perceptions-about-women-leaders-improve-but-gap-remains/> 11/08/2014: 08.07 pm.
- Status Perempuan dalam Kabinet dalam FGD-Focus Group Discussion oleh Yayasan Jurnal Perempuan, Rabu 29 Oktober jam 12.00-17.00 WIB
- Jalalzai, Farida. 2013. *Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide*. Oxford University Press.
- Jurnal Perempuan Edisi 82 "Pemilu, Agama dan Status Perempuan". Agustus/2014.
- Krook, Mona Lena and Diana O'Brien. 2012. "All the President's Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide". *Journal of Politics*. 74 (3): 840-855.
- Krook, M.L. and Mackay, F. (eds) (2011) *Gender, Politics and Institutions: Towards a feminist institutionalism*. Palgrave.
- Laver, Michael & Kenneth A. Shepsle. 1994. Cabinet Ministers and Government Formation in Parliamentary Democracies. *Cabinet Ministers and Parliamentary Government*. Michael
- Laver and Kenneth A. Shepsle (eds). New York: Cambridge University Press.
- Poguntke, Thomas and Paul Webb (Eds) 2005. *The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies*. Oxford University Press.
- Vermonte, Philips J. & et al. 2014. *The Increased Number of Female Members of Parliament: Identifying Its Origin and Obstacles in Indonesia, the Philippines and Timor-Leste*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- The Economist*. "Women in politics. Treating the fair sex fairly: Female ministers are fewer than their male colleagues, but equally effective". 9 August 2014.
- <http://www.economist.com/news/international/21611148-female-ministers-are-fewer-their-male-colleagues-equally-effective-treating?fsrc=scn/tw/te/pe/treatingthefairsexfairly> 11/08/2014: 08.17 pm.
- Wiliarty, Sarah Elise. "Frauenpower? Women in the Cabinet under Kohl, Schroeder and Merkel". Paper prepared for the ECPR Joint Sessions Workshop 16 'Gender Representation, and Power in the Executive Branch' Salamanca, Spain, April 2014.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan"	vii-viii
Artikel / Articles	
• Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / <i>Political Engineering for Women in Indonesian Governance</i>	257-264
<i>Philips J. Vermonte</i>	
• Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / <i>Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy</i>	265-270
<i>Mariana Amiruddin</i>	
• Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / <i>Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics</i>	271-277
<i>Ryan Sugiarto</i>	
• Kehendak Menakutkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / <i>Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet</i>	279-287
<i>Triyono Lukmantoro</i>	
• Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / <i>Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election</i>	289-306
<i>Kurniawati Hastuti Dewi</i>	
• Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / <i>Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics</i>	307-315
<i>Robert Endi Jaweng</i>	
• <i>Raison d'être</i> Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / <i>Raison d'être of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance</i>	317-326
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / <i>Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"</i>	327-332
<i>Anita Dhewy</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	333-334
Profil / Profile	
• Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / <i>Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes</i>	335-339
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / <i>How Linda Gumelar leads the Ministry?</i>	341-343
<i>Nadya Karima Melati</i>	

